



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH
SUB UNIT KERJA : BAGIAN UMUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN UMUM
3. NHK : 455181

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.129.775.000**

1. Tanah Seluas 979 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 440.550.000
2. Tanah Seluas 1095 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 492.750.000
3. Tanah Seluas 1874 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 93.700.000
4. Tanah Seluas 559 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 41.925.000
5. Tanah Seluas 717 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 35.850.000
6. Tanah Seluas 987 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
7. Tanah Seluas 2053 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
8. Tanah Seluas 955 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
9. Tanah Seluas 1553 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
10. Tanah Seluas 4000 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000



11. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m²/150 m² di TEMANGGUNG,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 6.500.000

1. MOTOR, HONDA REVO FIT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
6.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 79.858.181

F. HARTA LAINNYA Rp. 40.000.000

Sub Total Rp. 2.256.133.181

III. HUTANG Rp. 283.425.918

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.972.707.263

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.